

PARADIGMA MULTIKULTURALISME SEBAGAI AZAS PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEREALISASIKAN PERDAMAIAN MASYARAKAT PLURAL

Moch. Bachrurrosyady Amrulloh

Program Studi PAI, Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik

e-mail: rosyady.edu@gmail.com

Abstrak

Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Salah satu indikatornya adalah banyaknya Agama dimana Islam sebagai agama mayoritas. Sensus penduduk dewasa ini, 87% bangsa Indonesia beragama Islam, 13% non-Muslim. Jika dibandingkan Malaysia, 13% tersebut lebih banyak dari pada seluruh penduduk Malaysia. Namun Islam sebagai mayoritas ternyata belum bisa menjadi pioneer kedamaian dalam kemajemukan. Hal ini dibuktikan, dibanding tahun 2015, jumlah pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan tahun 2016 meningkat 7%. Pada 2016, terjadi 204 peristiwa dengan 313 tindakan pelanggaran KBB. Sementara 2015, 190 peristiwa dengan 249 tindakan pelanggaran. Sebagai mayoritas, umat Islam harus mampu bertahan dan mengayomi minoritas. Di sinilah paradigma multikulturalisme menjadi penting untuk diintegrasikan dalam azas pengembangan kurikulum PAI sehingga lembaga pendidikan Islam baik formal, non-formal, informal dapat mencetak masyarakat multikultural yang sehat dan menjadi pioneer perdamaian antar umat beragama. Secara substantif nilai multikultural terdapat pada beberapa ayat al-Qur'an. QS. Ali Imran 3:64 menekankan dialog sehingga potensi *mutual understanding* antar umat beragama terbangun. QS. Al-Hujurat

49:13, mengandung setidaknya tiga prinsip berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan, *plural is usual, equal is usual, modesty in diversity*. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menjadi azas religius pengembangan Kurikulum. Kemudian azas filosofis, secara ontologis; pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (*teaching diversity*), epistemologis; kurikulum ini dapat dikembangkan dengan *separated curriculum* atau *integrated curriculum model*, aksiologis; dengan pendidikan semacam ini kita menginginkan agar pelajar dapat tumbuh dalam suatu dunia yang bebas dari prasangka, bias dan diskriminasi atas nama apapun.

Kata Kunci: Paradigma Multikulturalisme, Azas Pengembangan Kurikulum PAI

Abstract

Indonesia consists of a large number of ethnic groups, cultures, religions, etc., so that the Indonesian nation-state can simply be called a multicultural society. One indicator is the number of Religions where Islam as the majority religion. The current population census, 87% of Indonesians are Muslim, 13% non-Muslims. When compared to Malaysia, 13% more than the entire population of Malaysia. But Islam as a majority cannot yet be a pioneer of peace in pluralism. This is evidenced, compared to 2015, the number of violations of Religious Freedom and Trust in 2016 increased 7%. In 2016, there were 204

events with 313 acts of KBB violation. While 2015, 190 events with 249 acts of infringement. As a majority, Muslims should be able to survive and protect minorities. This is where the multiculturalism paradigm becomes important to be integrated in the principles of developing the PAI curriculum so that formal, informal, informal Islamic education institutions can produce healthy multicultural societies and become peace pioneers among religious communities. Substantively, multicultural values are found in several verses of the Qur'an. QS. Ali Imran 3:64 emphasizes dialogue so that the potential for mutual understanding among religious communities is awakened. QS. Al-Hujurat 49:13, contains at least three principles concerning living in diversity and diversity, plural is common, equal is common, modesty in diversity. These verses of the Qur'an become the religious principles of curriculum development. Then the philosophical principle, ontologically; multicultural education is a way of teaching diversity, epistemological; this curriculum can be developed with a separated curriculum or integrated curriculum model, axiological; with this kind of education we want the learner to grow in a world free of prejudice, bias and discrimination in whatever name.

Keywords: Multicultural Paradigm, Islamic Curriculum Development Foundation

Pendahuluan

Pandangan dunia "multikultural" secara substantif sebenarnya tidaklah terlalu baru di Indonesia. Sebagai negara-bangsa yang menyatakan kemerdekaanya sejak lebih setengah abad silam, Indonesia sebenarnya telah memiliki dan terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Realitas social masyarakat Indonesia semacam itu sangat sulit dipungkiri dan

diingkari. Untuk itu, keragaman, atau kebinekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang.

Multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Senaliknya, tidak ada satu negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Dengan demikian, multikulturalisme merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat ditolak bagi setiap negara-bangsa di dunia ini. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai "kepercayaan" kepada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban. Di sini, multikulturalisme dapat dipandang sebagai landasan budaya (*cultural basis*) tidak hanya bagi kewargaan dan kewarganegaraan, tetapi juga bagi pendidikan (Baidhawi, 2005: VII).

Pembentukan masyarakat multicultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis dalam hal ini adalah melalui pendidikan multicultural yang diselenggarakan seluruh lembaga pendidikan, baik formal ataupun non-formal dan bahkan informal dalam masyarakat luas (Azyumardi Azra, 2007: 41).

Azaz-azaz Pengembangan Kurikulum PAI Multikultural

Dalam pembahasan ini, pertama perlu dikemukakan beberapa landasan

pengembangan kurikulum, karena landasan pengembangan kurikulum tidak hanya diperlukan bagi para penyusun kurikulum (makro) atau kurikulum tertulis yang sering disebut juga sebagai kurikulum ideal, akan tetapi terutama harus dipahami dan dijadikan dasar pertimbangan oleh pelaksana kurikulum (mikro) yaitu para pengawas pendidikan dan para guru serta pihak-pihak lain yang terkait dengan tugas-tugas pengelolaan pendidikan, sebagai bahan untuk dijadikan instrument dalam melakukan pembinaan terhadap implementasi kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan/persekolahan. Dengan posisinya yang penting tersebut, maka dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan berbagai landasan yang efektif dan efisien (Hasyim, 2015: 13-14).

Azas Religius Pengembangan Kurikulum PAI Multikultural

Dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah karena kedua kitab tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, abadi dan bersifat futuristik (Ali, 1989: 12-13). Landasan religius maksudnya bahwa kurikulum yang dikembangkan dalam satuan pendidikan muatannya harus menyesuaikan dengan keinginan pencipta manusia tentang pembinaan manusia. Karena yang dibina dalam kurikulum adalah manusia. Siapa pencipta manusia itu? Tak ada pendapat lain kecuali Allah Swt. dialah Maha. Maka dengan demikian pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus mengacu pada firman-Nya yakni al-Qur'an dan juga kepada hadits rasul-Nya (Gunawan, 2015: 39).

Dalam kajian pendidikan multikultural, azas religius ini haruslah berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, yang dapat menopang konsep pendidikan multikultural itu sendiri.

a. QS Ali Imran 3:64

Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan kemanusiaan (*unity of humankind*), tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, keudayaan, dan agama. Karena umat manusia tak ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan. Dan sama seperti tak ada jam tertentu yang mendapat kedudukan khusus, begitu pula tak ada satupun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (*the chosen people*). Ini dapat berarti bahwa dominasi ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan antithesis terhadap tauhid, dan karenanya harus dikecam sebagai kejahatan kemanusiaan (baca HAM). Pesan kesatuan ini secara tegas disinyalir QS. Ali Imran 3:64 (Baidhawi, 2005: 45).

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللَّهَ ۖ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

"Katakanlah: wahai semua penganut agama (dan kebudayaan)! Bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multikultural (kalimatun sawa') antara kami dan kamu ,,"

Dialog bukan semata percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga dapat berubah dan berkembang. Berubah artinya dialog yang terselenggara secara terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa pada kesaling fahaman (*mutual understanding*) melalui mana prasangka, stereotip dan celaan dapat dikurangi dan dieliminir.

b. QS. Al-Hujurat 49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini setidaknya mengandung tiga prinsip utama berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan (Baidhawi, 2005: 48-52). Pertama, prinsip *plural is usual*. Yakni, kepercayaan dan praktek kehidupan bersama yang menandakan kemejemukan sebagai suatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan. Prinsip kedua adalah *equal is usual*. Ayat tersebut merupakan normatifitas bagi kesadaran baru umat manusia mengenai realitas dunia yang plural.

Ketiga, prinsip *modesty in diversity*. Bersikap dewasa dalam merespon keragaman menghendaki kebersahajaan; yakni sikap moderat yang menjamin kearifan berfikir (*open mind*) dan bertindak.

Senada dengan Zakiyuddin, Tholchah Hasan juga menyatakan Ayat ini dapat kita gunakan sebagai landasan multiculturalism Islam (Tholchah Hasan, 2016: 39).

c. Sekilas Multiculturalisme Masa Nabi

Sebelum Rasulullah SAW hijrah kemadinan, beliau menyarankan para sahabat pengikutnya yang mengalami tekanan dan perlakuan zalim dari orang-orang kafir Quraiz Makkah, agar hijrah sementara ke Habsy (Ethiopia), untuk menyelamatkan agama mereka, padahal Habsyi berpenduduk mayoritas Nasrani (Kristen), dan Negus (kepala negaranya) juga beragama Nasrani. Rasulullah SAW berwasiat ketika melepas para sahabatnya itu, "Hendaknya kalian keluar berhijrah ke negeri Habsyi, di sana ada raja yang tidak membiarkan seseorang terzalimi negeri itu adalah negeri kebenaran (Tholchah Hasan, 2016: 46)."

Ibnu Ishaq, (sejarawan terkenal pada masa awal Islam), menerangkan bahwa utusan Kabilah Najram yang beragama Kristen menghadap kepada Rasulullah SAW mempersilahkan mereka beribadah di masjid itu. Para sahabat yang mengetahui peristiwa itu berusaha menghalangi mereka, tapi Rasulullah SAW bersabda "biarkan mereka" (Tholchah Hasan, 2016: 46).

Berdasarkan dua riwayat tersebut, hal ini menegaskan bahwa tidak ada permasalahan agama dalam menciptakan perdamaian masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai multikultural.

d. Sekilas Gagasan Para Ilmuan Muslim

Ibnu Sina mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah “pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual dan budi pekerti”. Selain itu tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan dan potensi yang dimilikinya. Ibnu Sina menambahkan dengan pendidikan budi pekerti diharapkan seorang anak memiliki kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari dan sehat jiwanya (Muhammad Iqbal, 2015: 6-7).

Kemudian pengertian pendidikan menurut al-Ghazali adalah menghilangkan ahlak yang buruk dan menanamkan ahlak yang baik. Dengan demikian pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan-perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Selanjutnya al-Ghazali juga membarikan keterangan tentang kode etik guru, beberapa yang bisa diambil adalah; tidak menggunakan kekerasan, cacian, makian dan sebagainya; menghilangkan dan menghindari sikap angkuh terhadap sesama; bersikap rendah hati ketika menyatu dengan sekelompok masyarakat (Muhammad Iqbal, 2015: 90).

Berbicara tujuan pendidikan dalam Islam, Pemikir Islam Kontemporer, M. Naquib al-Attas, mendefinisikan arti pendidikan secara sistematis, menegaskan dan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Islam adalah untuk menciptakan manusia yang baik (*good*

man), bukan – seperti dalam peradaban barat – menghasilkan warga negara yang baik (*good citizen*). Tampaknya al-Attas lebih menekankan pada aspek individu, tetapi tidak berarti mengabaikan terbentuknya masyarakat yang ideal, sebagaimana yang ditulisnya: “tujuan ilmu pengetahuan adalah melahirkan manusia yang baik, kami tidak bermaksud untuk melahirkan masyarakat yang baik. Karena masyarakat terdiri dari individu, melahirkan seseorang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang baik. Pendidikan adalah pembuatan (struktur) masyarakat” (Muhammad Iqbal, 2015: 310-311).

Jika menelaah beberapa pemikiran para tokoh intelektual muslim diatas, amat syarat dengan nilai-nilai multikulturalisme dalam aspek pendidikan untuk melahirkan individu berkualitas dalam masyarakat.

Azas Filosofis Pengembangan Kurikulum PAI Multikultural

Dalam Junaidi, kata filsafat yang diserap dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata “*falsafah*” (bahasa Arab), dan “*philosophy*” (bahasa Inggris) (Djunaidi Ghani, 2015: 01). Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata “*philos*” dan “*sophia*”. *Philos*, artinya cinta yang mendalam, dan *Sophia* adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Henderson dalam Wina Sanjaya mengemukakan “*popularly philosophy means one’s general view of life of men, of ideals, and of values, in the sense everyone has a philosophy of life*”. Dengan demikian, maka jelas setiap individu atau setiap kelompok

masyarakat secara filosofis akan memiliki pandangan hidup yang mungkin berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang dianggapnya baik (Wina Sanjaya, 2010: 42-43).

Muhaimin dalam bukunya menjelaskan hakikat pendidikan Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dapat ditilik dari ketiga persoalan tersebut (*ontology, epistimologi dan aksiologi*). Langgulong misalnya, mendefinisikan pendidikan Islam ditinjau dari tiga pendekatan, yaitu (1) menganggap pendidikan sebagai pengembangan potensi; (2) cenderung melihatnya sebagai pewarisan budaya; dan (3) menggabungkannya sebagai interaksi antara potensi dan budaya (Muhaimin, 2014: 67).

Dari definisi tersebut akan muncul pertanyaan-pertanyaan *ontologis* sebagai berikut: apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia? Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat istilah *fitrah*, samakah potensi dengan *fitrah* tersebut? Apa hakikat budaya yang perlu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya? Apakah termasuk di dalamnya ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis (Islam ideal)? Ataukah hanya ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam sebagaimana terwujud dalam realitas sejarah umat Islam (Islam sejarah) yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan *epistimologi* menyangkut hal-hal berikut: untuk mengembangkan potensi dan/atau *fitrah* serta mewariskan budaya dan interaksi antara potensi dan budaya tersebut, apa saja isi pendidikan Islam (kurikulum) yang perlu dididikkan? Dengan apa pendidikan Islam (metode) itu dijalankan? Siapa yang berhak mendidik dan dididik dalam pendidikan Islam? Sedangkan pertanyaan-pertanyaan *aksiologis*

bermuaara pada masalah: untuk apa potensi dan/atau *fitrah* manusia itu dikembangkan dalam pendidikan Islam? Untuk apa pula budaya itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pendidikan Islam? Diarahkan ke mana pengembangan potensi dan/atau *fitrah* serta pewarisan budaya tersebut? Apa tujuan pendidikan Islam itu sendiri? Uraian tersebut menggambarkan bahwa filsafat pendidikan mengkhususkan masalah-masalah pendidikan sebagai objek kajian yang dilihat dari ketiga persoalan, yaitu *ontologis, epistimologis, dan aksiologis* (Muhaimin, 2014: 67-68).

Senada dengan Muhaimin, Wina Sanjaya secara substansi menjelaskan filsafat sebagai landasan pengembangan kurikulum menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok seperti: hendak dibawa ke mana siswa yang didik itu? Masyarakat yang bagaimana yang harus diciptakan melalui ikhtiar pendidikan? Apa hakikat pengetahuan yang harus dipelajari dan dikaji siswa? Norma-norma atau sistem nilai yang bagaimana yang harus diwariskan kepada anak didik sebagai generasi penerus? Bagaimana sebaiknya proses pendidikan itu berlangsung? (Wina Sanjaya, 2010: 43)

Dasar ini memberi arah dan kompas tujuan pendidikan. Dengan dasar filosofis sehingga susunan kurikulum mengandung satu kebenaran terutama kebenaran dibidang nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini dari suatu kebenaran. Hal tersebut karena satu kajian filsafat adalah sistem nilai, baik yang berkaitan dengan cara hidup dan kehidupan, norma-norma yang muncul dari individu sekelompok masyarakat ataupun bangsa yang dilatarbelakangi pengaruh agama, adat istiadat dan konsep individu tentang pendidikan (Ali, 1989: 11-12).

a. Definisi Multikulturalisme

Dalam menjawab beberapa pertanyaan yang bersifat filosofis tersebut, perlu kiranya menjabarkan pengertian multikulturalisme terlebih dahulu. Azzyumardi Azra mendefinisikan multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Multikulturalisme dapat pula dipahami sebagai kepercayaan kepada normalitas dan penerimaan keberagaman (Baidhawi, 2005: viii). Tholhah Hasan mendefinisikan pada dasarnya multikulturalisme merupakan konsep dimana sebuah komunitas atau eksistensi sekumpulan manusia dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, ras, agama, dan bahasa. Multikulturalisme juga sebuah konsep yang memberikan pemahaman, bahwa sebuah bangsa yang plural adalah bangsa yang terdiri dari beberapa jenis etnis, budaya, agama, tradisi, dan bahasa yang bermacam-macam, yang dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam suasana damai dan rukun (*coexistance*) (Tholhah Hasan, 2015: 38-39). Beliau juga menambahkan paradigma multikulturalisme menggariskan kepada kita agar memiliki apresiasi dan respek terhadap suku, budaya, agama, bahasa dan tradisi orang lain, meskipun kita tetap memiliki dan meyakini serta menjaga identitas dan kepribadian kita sendiri, kita juga dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan dapat bekerjasama dalam perbedaan yang ada diantara kita.

b. Pendidikan Multikultural

Banks sebagaimana dikutip Tilaar mendefinisikan pendidikan

multikultural "multicultural education is a concept, a framework, a way of thinking, a philosophical viewpoint, a value orientation, and a set of criteria for making decision that better serve the education needs of culturally diverse student population" (Tilaar, 2004: 122).

Secara sederhana Azzyumardi Azra dalam Zakiyudin mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan.

Pada akhirnya pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman (teaching diversity). Pendidikan multikultural menghendaki rasionalisasi etnis, intelektual, social dan pragmatis secara inter-relatif: yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusivisme, pluralism, dan saling menghargai semua orang—dan kebudayaan manusia imperative humanistic yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etis partisipasi sipil secara penuh dalam demokrasi multikultural dan dunia manusia yang beragam--; mengintegrasikan tentang fakta-fakta, sejarah, kebudayaan, nilai-nilai, struktur, prospektif, dan kontribusi semua kelompok kedalam kurikulum sehingga dapat membangun pengetahuan yang lebih kaya, kompleks, dan akurat tentang kondisi kemanusiaan di dalam dan melintasi konteks waktu, ruang dan kebudayaan tertentu (Baidhawi, 2005: 8).

Pendidikan multikultural meredefinisi orang terpelajar sejati sebagai orang yang mengakui kebudayaannya sendiri sebagai salah satu dari banyak kebudayaan; yang menggunakan pengetahuannya tentang masyarakat dan kebudayaan lain untuk memahami dirinya sendiri secara lebih baik; yang belajar menilai

prespektif-prespektif kultural yang plural dan mengintegrasikannya kedalam prespektif kulturalnya sendiri; dan yang tidak hanya mentoleransi bahkan memahami, menghargai, dan mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan lain sekaligus kebudayaannya sendiri. Mengakui bahwa pola-pola dan perubahan-perubahan demografis telah mengubah populasi siswa menuntut penciptaan iklim pendidikan inklusif yang responsive dan relevan dengan kebutuhan semua siswa, membangun harga diri dan mendukung pembentukan identitas siswa dengan semua kelompok etnik dan kebudayaan di dalam kelas (Baidhawi, 2005: 8).

Dengan pendidikan semacam ini kita menginginkan agar siswa atau pelajar—dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi—dapat tumbuh dalam suatu dunia yang bebas dari prasangka, bias dan diskriminasi atas nama apapun—agama, gender, ras, warna kulit, kebudayaan, kelas, dan sebagainya—untuk mencapai suatu tujuan mereka dan merasakan bahwa apapun yang mereka kehendaki untuk dapat terlaksana dalam kehidupan ini menjadi mungkin. Kita berharap mereka merasa dicintai dan tidak pernah mengalami penderitaan akibat penolakan dan pengucilan. Namun demikian memang sulit untuk ditolak bahwa kini kita hidup dalam dunia dimana bias, diskriminasi, prasangka dan rasisime terus mempengaruhi kehidupan manusia. Bentuk-bentuk penindasan semacam itu telah menyakiti dan meninggalkan luka yang dapat mengakhiri kehidupan, menghalangi tujuan, ambisi dan pilihan kehidupan serta harga diri (Baidhawi, 2005: 9).

Siapa yang membutuhkan pendidikan multikultural? Untuk

menjawab pertanyaan ini, setidaknya kita mempunyai dua paradigm: paradigm toleransi dan paradigm transformasi. Paradigm toleransi memandang bahwa: semua anak-anak atau siswa di berbagai kelompok yang menjadi target prasangka sosial dan kultural membutuhkan pendidikan multikultural untuk membangun kembali harga diri mereka yang rendah. Sementara paradigm transformative menyatakan: setiap orang membutuhkan pendidikan multikultural, pendidikan anti-bias dalam semua setting pendidikan tanpa terkecuali; persoalan-persoalan dan tugas-tugas sekolah akan bervariasi lagi bagi siswa tergantung pada latar belakang social-kultural mereka sekaligus keluarga dan pengalaman hidupnya; dan orang tua dan guru sekaligus siswa dapat perlu terlibat dalam pendidikan multikultural dan pendidikan anti penindasan. Melihat dua paradigm ini, konteks Indonesia kontemporer nampaknya sudah saatnya dan tepat untuk mengakomodasi paradigm yang kedua, guna menciptakan perubahan fundamental dalam etika kehidupan bersama-masyarakat, berbangsa dan bernegara (Baidhawi, 2005: 9-10).

Azas Psikologis Pengembangan Kurikulum PAI Multikultural

Dasar ini mempertimbangkan tahapan psikis anak didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, kematangan, bakat bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, sosial, kebutuhan dan keinginan individu, minat dan kecakapan. Dasar psikologis terbagi kepada dua macam, yaitu: pertama psikologi belajar, hakikat anak itu dapat dididik, dibelajarkan dan diberikan sejumlah materi dan pengetahuan. Disamping itu hakikat anak dapat merubah sikapnya serta dapat menerima norma

norma, dapat mempelajari keterampilan keterampilan berpijak dari kemampuan anak tersebut. Oleh karena itu bagaimana kurikulum memberikan peluang belajar bagi anak tersebut dan bagaimana proses belajar berlangsung, serta dalam keadaan bagaimana anak itu memberi hasil yang sebaik baiknya. Kedua psikologi anak, setiap anak mempunyai kepentingan yakni untuk mendapatkan situasi situasi belajar kepada anak anak untuk mengembangkan bakatnya. Oleh karena itu wajarlah bila anak merupakan faktor penentu dalam pembinaan kurikulum yang berlangsung selama proses belajar mengajar (Nasution, 1990: 22-23).

Dalam aspek psikologi anak siswa, kasus intoleransi dewasa ini menurut Peneliti Wahid Institut sudah merambah pada lingkungan sekolahan terlebih sekolah umum. Kasus intoleransi dalam lingkungan pelajar dan mahasiswa, seperti pelarangan memakai cadar, pelarangan memakai jilbab, pemilihan ketua osis sesuai Agama mayoritas, berdampak pada aspek psikologis siswa, dimana dampak tersebut mempengaruhi masa depan siswa. Sehingga paradigma multikulturalisme sebagai azas pengembangan kurikulum PAI menjadi sangat penting agar kasus intoleransi khususnya keagamaan semakin sedikit.

Simpulan

Setelah mencermati beberapa literature terkait pengembangan kurikulum. Masih sangat minim ditemukan pembahasan tentang landasan pengembangan kurikulum PAI berbasis paradigma multikulturalisme. Namun hal tersebut tidak membuat jalan multikulturalisme masuk kedalam dunia pendidikan tertutup. Keduanya baik multikulturalisme maupun pendidikan mempunyai

tujuan yang sama yaitu memanusiakan manusia sehingga baik landasan religius, landasan filosofi, landasan psikologis mempunyai keterikatan yang erat dengan nilai-nilai multikulturalisme. Terlebih Pendidikan Agama Islam Indonesia yang mengusung nilai-nilai ta'aruf, tasammuh, tawazzun, ta'awun sangat relevan jika disandingkan dengan paradigma multikulturalisme. Terlebih dengan paradigma ini, dunia pendidikan baik formal, non-formal, informal menjadi wahana persemayanan nilai-nilai saling memahami, saling menghargai atas keragaman yang ada di Indonesia.

Akhirnya tulisan ini mencoba mencari titik temu antara landasan pengembangan kurikulum PAI dengan multikulturalisme.

Daftar Rujukan

- Baidhaw, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, Heri. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Muhammad Tholchah. 2016. *Pendidikan Multikultural sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*. Lembaga Penerbitan UNISMA.
- Hasyim, Farid. 2015. *Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Malang: Madani.
- Nasution, S. 1990. *Asas-asas Kurikulum*. Bandung: Jemmars.
- Sanjaya, Wina. 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana.
- The Wahid Intitute, Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, 2014.

Tilaar, H. A. R. 2004. *Multikulturalisme
: Tantangan-tantangan Global
Masa Depan dalam Transformasi*

Pendidikan Nasional, Jakarta:
Grasindo.